



Surat Biasa

biasa - Resi kirim

Tanggal : Jakarta, dd mmm yyyy
Nomor : mmddA/SK/2025
Hal :
.....

Dari :
Nama : Fungsiawan
NIK / NPWP 16 : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace C 8 E K , Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Pekerjaan : Swasta / Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.....
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Nama Wajib Pajak :
NPWP 16 WP :

Kepada :
Nama : Yth. Direktur Jenderal Pajak
cq. Kepala Kanwil
cq. Kepala KPP
Alamat : KPP Pratama
Jl. Kel. Kec. Kota 00000
Telp / Email : Telp / no hp AR / Email

biasa - isi

(KOP Surat (jika WP Badan) : jika bukan WP Badan, hapus saja baris ini)

Tanggal : Jakarta, dd mmm yyyy
Nomor : mmddA/PPID/2025
Hal :
.....

Yth. Direktur Jenderal Pajak

cq. Kepala Kanwil
cq. Kepala KPP

KPP Pratama
Jl. Kel. Kec. Kota 00000
Telp / no hp AR / Email

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fungsiawan
NIK : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace C 8 E K , Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Pekerjaan : Swasta / Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.....
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Posisi : Prinsipal Wajib Pajak ▾
Nama Wajib Pajak :
NIK/NPWP16 WP :

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Nomor ... Tanggal Hal , bersama ini Kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa
 - a.
 - b.
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...

- 2. Bahwa ...
- 3. Bahwa ...
- 4.

5. Permintaan Informasi Harus Dijawab Tertulis oleh Pejabat

- a. Bahwa sesuai Pasal 22 UU KIP, Saudara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan ini. Saudara dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- b. Bahwa sesuai pasal 36 UU KIP, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan

keberatan. Atasan Pejabat wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis wajib disertakan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

- c. Bahwa sesuai pasal 37 UU KIP, Pemohon Informasi dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.
- d. Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”
- e. Bahwa dalam hal Saudara dengan sengaja tidak memberikan informasi sesuai permohonan permintaan dalam surat ini, maka Saudara dapat dikenakan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda Rp. 5.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Fiktif Positif Jika Saudara Tidak Membuat Keputusan Maksimal 5 Hari Kerja

- a. Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja : "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- b. Pasal 53 ayat 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja : "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum."
- c. Bahwa dalam hal Saudara tidak membuat keputusan atas permintaan permohonan ini dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja sejak surat permintaan permohonan Kami, maka Permintaan Permohonan Kami dianggap dikabulkan secara Hukum (Fiktif Positif), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Fungsiawan

Tembusan :	
Presiden Republik Indonesia	: persuratan@setneg.go.id, humas@setkab.go.id
Menteri Keuangan RI (Prime Kemenkeu)	: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Menteri Keuangan (Itjen Kemenkeu)	: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Pajak	: humas@pajak.go.id
Kepala Kanwil	: ...
Pengaduan DJP	: pengaduan@pajak.go.id
Itjen - Kode Etik DJP	: kode.etik@pajak.go.id
Komwasjak	: pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id
Ketua Ombudsman RI	: pengaduan@ombudsman.go.id
Ketua Komisi Informasi Pusat RI	: sekretariat@komisiinformasi.go.id
DPR	: bag_pkorb@dpr.go.id
DPD	: humas@dpd.go.id
MPR	: setjen@mpr.go.id
KPK	: pengaduan@kpk.go.id
BPK	: eppid@bpk.go.id
Kejaksaan	: lapor@kejaksaan.go.id
Arsip	

Surat Hibah

hibah - isi

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Jakarta, 13 Juni 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tgl lahir :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**,

Nama :
Tempat, tgl lahir :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**,

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2025 Pihak Pertama telah memberikan Hibah Harta kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

No	Nama Harta	Atas Nama	Nomor	Lokasi	Nilai
1	Tanah Bangunan				
2	Tabungan				
3	Deposito				
4	Uang Tunai				
5					
6					
7					
Total Nilai Rupiah					

Pihak pertama menyatakan bahwa harta hibahan tersebut selama dikuasai Pihak Pertama tidak pernah terjadi suatu sengketa ataupun gugatan hukum oleh pihak lain, maka mulai dari tanggal surat hibah ini Harta tersebut menjadi sepenuhnya hak milik dari Pihak Kedua.

Demikian surat hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

Pihak Keduua

meterai 10rb

..NamaPemberiHibah...

..NamaPenerimaHibah..

Saksi-Saksi : (jika tidak ada saksi, bagian ini boleh dihapus)

1.NamaSaksi.... (.....ttd.....)

2.NamaSaksi.... (.....ttd.....)

3.NamaSaksi.... (.....ttd.....)

4.NamaSaksi.... (.....ttd.....)



S. Permintaan Tindakan



Resi Kirim

Dari :

Nama : Fungsiawan

NIK : 3171031306880006

Alamat : Apartemen Mediterania Palace Tower C, Unit C 8 E K , Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630

HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com

Pekerjaan : Konsultan Pajak - Pengacara Pajak

Tanggal : Jakarta, 14 September 2025

Nomor : 0914A/SK/2025

Hal : **Permintaan Tindakan Audiensi Bersama Rakyat Sehubungan dengan Dunia Persilatan Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan.**

Kepada :

Nama : Yth. Menteri Keuangan (Bapak Purbaya Yudhi Sadewa)

Alamat : Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710.

Telp / Email : (021) 3449230



isi surat

Tanggal : Jakarta, 14 September 2025
Nomor : 0914A/SK/2025
Hal : **Permintaan Tindakan Audiensi Bersama Rakyat Sehubungan dengan Dunia Persilatan Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan.**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fungsiawan
NIK : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace Tower C, Unit C 8 E K , Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Telp / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Pekerjaan : Konsultan Pajak - Pengacara Pajak

Yth. Menteri Keuangan (Bapak Purbaya Yudhi Sadewa),
Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilantiknya Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan baru pada tanggal 8 September 2025, maka Kami menyampaikan Permintaan Tindakan Audiensi Bersama Rakyat Sehubungan dengan Dunia Persilatan Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak telah menggantikan seorang OKNUM MENKEU yang sudah puluhan tahun menyengsarakan rakyat jelata di negara Indonesia ini. Beliau adalah Menteri yang BUTA DAN TULI, tidak mau mendengar atau membaca kritik saran masukan dari rakyatnya. Saya dan banyak organ masyarakat sudah berusaha berkomunikasi dengan beliau namun selalu hanya dikasih “kentut” saja. Sulit sekali warga rakyat jelata dapat menjangkau apalagi berkomunikasi apalagi memberi kritik dan saran kepada Oknum Mantan Menteri keuangan tersebut.
2. Kehadiran Bapak Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, terlepas dari segala kontroversinya, telah menjadi angin segar, membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap Bapak tidak melanjutkan kebiasaan buruk dari menteri sebelumnya yang tidak mau mendengar aspirasi apalagi kritik saran dari masyarakat jelata seperti saya ini. Oknum mantan Menkeu tersebut hanya mau turun tangan apabila sudah VIRAL di media sosial, contoh nya seperti kasus Rafael Alun, kasus soleh solihun, dan kasus viral lainnya, itupun hanya dalam rangka untuk pansos saja, tidak menghilangkan masalah sampai ke akar nya !!. kalau tidak viral, kami tidak bisa berkomunikasi dengan oknum menteri tersebut.
3. Pagi hari ini, saya mendapatkan video Bapak yang sudah lawas pada link ini : <https://www.instagram.com/p/DOkUCm2k9 F/> , ternyata Bapak adalah orang

yang mengkampanyekan “Yes Men = Bodoh”, dan sangat terbuka terhadap kritik dan saran, tidak takut dengan perbedaan pendapat, terbuka untuk diberi pendapat oleh anak buah secara demokratis, tidak akan memindahkan atau menghukum atau mengancam atau mengintimidasi anak buah yang berbeda pendapat. Saya berasumsi ini juga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin berkomunikasi dengan Bapak.

4. Maka **untuk menguji integritas Bapak**, untuk menguji omongan mulut Bapak, maka Saya mengirim surat resmi ini, bahwa Saya bersama organ masyarakat luas ingin berkomunikasi secara langsung, ingin menyampaikan pendapat dan keluhan, saran dan kritik, informasi pengaduan dan **solusi yang membangun bagi bangsa dan negara**, terutama pada dunia persilatan PERPAJAKAN.
5. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan, UU PERATUN, dan Pasal 52 UU KIP, Kami warga masyarakat jelata, dapat meminta pejabat publik melakukan tindakan tertentu yang tidak melawan hukum, maka Kami meminta Bapak melakukan hal - hal di bawah ini :
 - a. Membalas tertulis surat ini dengan memenuhi atau menolak poin poin permintaan dalam surat ini. Bapak dapat mengirim ke email saja halo@pajaksmart.com atau WA ke nomor Saya 082149885820 untuk mempercepat komunikasi.
 - b. Menjadwalkan agenda pertemuan audiensi dengan Saya dan organ masyarakat lainnya pada waktu dan tempat yang Bapak tentukan. Satu hal yang penting adalah Kami ingin pertemuan tersebut harus Transparan, direkam dan dapat disiarkan secara umum. Kami minta waktu tersebut tidak lebih dari 14 hari kerja sejak surat ini diterima.
6. Untuk mengantisipasi, apabila ternyata Bapak juga sama dengan menteri yang sebelumnya, dimana apabila ternyata Bapak tidak menyediakan waktu untuk menerima aspirasi dari rakyat, alias surat ini tidak dibalas, maka saya menyampaikan sekilas saja seputar aspirasi Saya berikut ini :
 - a. Meminta Bapak segera merampungkan aturan hukum mengenai perpanjangan PPH Final UMKM 0,5%, sudah sejak desember 2024, tidak ada kepastian hukum mengenai hal ini. Kami meminta PPH Final 0,5% UMKM ini, yang sudah sederhana janganlah dibuat ribet dan rumit !! , kami meminta PPH Final UMKM 0,5% ini DIPERMANENKAN saja !!. Bapak dapat “mengatur” tarif nya menjadi lebih tinggi, tetapi prinsip sederhana nya tolong jangan dihapus !!. Tuangkan dalam peraturan hukum yang jelas !!.
 - b. Meminta Bapak membatalkan PER 17 2015 tentang Norma !! Aturan ini sudah banyak menjerat dan menghantam wajib pajak secara membabi buta. Wajib pajak dikenai pajak puluhan miliar, bukan berdasarkan kondisi sebenarnya, tetapi berdasarkan PER 17 2015 yang sudah ketinggalan zaman, yang sudah tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat.
 - c. Meminta Bapak menerbitkan maklumat atau perintah eksekutif atau PMK atau apapun lah istilahnya, yang mana Bapak memerintahkan seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak untuk **TIDAK MELANGGAR HUKUM APAPUN** !!. Selama ini dalam praktek nya, pegawai DJP itu hanya mau mengakui dan patuh pada UU Perpajakan saja, dan tidak mau mematuhi UU yang lain, contohnya UUD ataupun UU AP. Sehingga seringkali terjadi pelanggaran hukum oleh Fiskus, tetap “dibenarkan” oleh Dirjen Pajak, katanya : sepanjang tidak melanggar UU Perpajakan, kami boleh saja melanggar hukum yang lain termasuk UU AP. Bapak harus memberikan

sanksi yang tegas dalam perintah eksekutif tersebut apabila ada Fiskus yang melanggar nya !!

- d. Meminta Bapak memerintahkan semua Kantor Pajak (KPP) dimanapun di seluruh Indonesia ini, untuk **MENCABUT dan MEMBAKAR poster** atau tulisan apapun mengenai larangan merekam audio visual di kantor pajak oleh wajib pajak, karena tidak ada dasar hukum apapun atas terbitnya poster tersebut. Apabila Bapak berniat untuk tetap mempertahankan poster tersebut, maka silahkan saja Bapak membuat aturan hukumnya mengenai larangan merekam di kantor pajak, supaya terdapat kepastian hukum dan kami warga negara bisa melakukan korupsi atau memberi uang suap secara bebas di kantor pajak (karena toh dapat dipastikan tidak ada rekaman dari WP). Saya juga melihat video dimana Bapak meminta transparansi pada lembaga MBG supaya membuat laporan terbuka setiap bulan ke publik. Saya berharap Bapak akan mendukung upaya transparansi di internal lembaga Bapak, minimal pada lembaga DJP !!
- e. Meminta Bapak membatalkan SE (surat edaran) yang menyatakan prosedur pemeriksaan hanya dalam rangka untuk evaluasi internal, alias SE tersebut menyatakan Fiskus Boleh melanggar hukum karena itu hanya utk evaluasi internal !!
- f. Meminta Bapak membatalkan Nota Dinas yang melarang wajib pajak merekam audio visual di kantor pajak. Nota Dinas Bukan Dasar Hukum dan tidak dapat mengikat orang eksternal seperti wajib pajak yang bukan pegawai internal, namun ND tersebut justru bertindak sewenang wenang terhadap warga masyarakat.
- g. Meminta Bapak memerintahkan kepada Dirjen Pajak, agar SEMUA Dokumen yang diterbitkan DJP, termasuk Keterangan Tertulis, Harus di tandatangani oleh pejabat DJP dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena selama ini tidak ada ttd pejabat DJP pada surat keterangan tertulis yang disiarkan kepada publik, dan seringkali KT tersebut justru memberikan edukasi yang salah dan sesat, kemudian direvisi seenak jidat nya si Fiskus, tanpa perlu merasa bersalah, tidak perlu meminta maaf dan tidak perlu mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Fungsiawan



PPID-KIP

Langkah-langkah Sengketa Komisi Informasi

1. Kirim **Surat Permintaan Informasi** tertulis,

No	Daftar PPID	Permintaan Awal	Atasan PPID (keberatan)
1	Kemenkeu, DJP, DJBC,	Melalui portal https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/login	
2	KomnasHAM	Formulir : https://drive.google.com/open?id=1-fSFA21E7tnXOOaebeeB-3EpevaOS9gX&usp=drive_fs Email : ppid@komnasham.go.id	Formulir : https://drive.google.com/open?id=1-fSFA21E7tnXOOaebeeB-3EpevaOS9gX&usp=drive_fs sekretaris jenderal, belum tahu emailnya Kepada : Sekretaris Jenderal KomNasHAM Selaku Atasan PPID KomNasHam. Kantor Komnas HAM Pusat Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat Telp. 021-3925230
3	KPP Jakarta Cengkareng		
4	Komisi Yudisial https://ppid.komisiyudisial.go.id/beranda	email : ppid@komisiyudisial.go.id portal : https://ppid.komisiyudisial.go.id/register	
Formulir sengketa KIP : https://drive.google.com/open?id=1ef0kbbO3EuC9ScjMpVY4V95N5yKspuLF&usp=drive_fs Submit Sengketa KIP : 14 hari : https://sipsi.komisiinformasi.go.id/login			

2. Mungkin akan ada jawaban dari PPID, pantau di website, dan juga akan diemail
3. ajukan keberatan di website itu juga
4. Akan ada tanggapan atas keberatan
- 5.
6. Trus Anda masuk ke **Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat**, melalui email ke : **kepaniteraankip@gmail.com** ,
- a. **persyaratan disini** :
<https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik>

Berikut Syarat Pendaftaran Permohonanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

1. Identitas Pemohon

Pemohon Individu (Lampirkan KTP)

Pemohon Badan Hukum (Lampirkan SK Kumham dan Akta Pendirian)

Pemohon Kelompok Masyarakat (Lampirkan Surat Kuasa)

2. Berkas Permohonan Kepada Badan Publik

Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik

Surat Jawaban dari Badan Publik (Apabila Ada)

Surat Keberatan

Surat Jawaban Keberatan (Apabila Ada)

Permohonan dapat mengajukan Permohonan secara langsung ataupun melalui Surat Elektronik melalui

kepaniteraan@komisiinformasi.go.id atau kepaniteraankip@gmail.com dengan melampirkan persyaratan yang tercantum diatas.

1 permintaan informasi

resi kirim

Tanggal : Jakarta, dd mmm yyyy
Nomor : mmddA/PPID/2025
Hal : Permohonan Permintaan Informasi
.....

Dari :
Nama : Fungsiawan
NIK / NPWP 16 : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace C 8 E K , Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Pekerjaan : Swasta / Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.....
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Nama Wajib Pajak :
NPWP 16 WP :

Kepada :
Nama : Yth. Direktur Jenderal Pajak
cq. Kepala Kanwil
cq. Kepala KPP
Alamat : KPP Pratama
Jl. Kel. Kec. Kota 00000
Telp / Email : Telp / no hp AR / Email

1 Surat Permintaan Informasi

(KOP Surat (jika WP Badan) : jika bukan WP Badan, hapus saja baris ini)

Nomor Pendaftaran (diisi oleh petugas) : REG-.....

Tanggal : <Jakarta, dd mmm yyyy>
Nomor : <mmddA/PPID/2025>
Hal : Permohonan Permintaan Informasi
.....

Yth. Pejabat PPID Kementerian Keuangan

cq. Kepala Kanwil
cq. Kepala KPP

KPP Pratama
Jl. Kel. Kec. Kota 00000
Telp / no hp AR / Email

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fungsiawan
NIK / NPWP 16 : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace C 8 E K , Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Pekerjaan : Swasta / Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.....
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Nama Wajib Pajak :
NPWP 16 WP :

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Nomor ... Tanggal Hal , bersama ini Kami menyampaikan Permintaan Informasi sebagai berikut :

7. Rincian Informasi yang dibutuhkan :
- a.
 - b.
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
8. Tujuan Penggunaan Informasi : Hak mendapatkan informasi publik
9. Berkas Pendukung : terlampir langsung menjadi bagian isi surat ini.
- a. KTP Pemohon Informasi



b.

c. ...

d. ...

10. Cara memperoleh informasi : salinan softcopy pemberitahuan tertulis ,
di email ke halo@pajaksmart.com
11. Bahwa sesuai Pasal 22 UU KIP, Saudara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan ini. Saudara dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
12. Bahwa sesuai pasal 36 UU KIP, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan keberatan. Atasan Pejabat wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis wajib disertakan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
13. Bahwa sesuai pasal 37 UU KIP, Pemohon Informasi dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.
14. Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”
15. Bahwa dalam hal Saudara dengan sengaja tidak memberikan informasi sesuai permohonan permintaan dalam surat ini, maka Saudara dapat dikenakan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda Rp. 5.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hormat Saya

Fungsiawan

2 Penjelasan tertulis dari PPID

taruh disini Penjelasan Tertulis PPID nya , copy paste tulisannya
Penjelasan Tertulis PPID

a. Alasan Keberatan Rinci :

1. Permohonan informasi nomor 1
 1. Isi Permohonan informasi :
 2. Penjelasan tertulis pejabat :
 3. Alasan Keberatan Pemohon :
2. Permohonan informasi nomor 2
 1. Isi Permohonan informasi :
 2. Penjelasan tertulis pejabat :
 3. Alasan Keberatan Pemohon :
3. Permohonan informasi nomor 3
 1. Isi Permohonan informasi :
 2. Penjelasan tertulis pejabat :
 3. Alasan Keberatan Pemohon :
4. Permohonan informasi nomor 4
 1. Isi Permohonan informasi :
 2. Penjelasan tertulis pejabat :
 3. Alasan Keberatan Pemohon :
5. Permohonan informasi nomor 5
 1. Isi Permohonan informasi :
 2. Penjelasan tertulis pejabat :
 3. Alasan Keberatan Pemohon :

3 Keberatan Pemohon

Resi kirim

Tanggal : Jakarta, dd mmm yyyy
Nomor : mmdA/PPID/2025
Hal : Keberatan Kepada Atasan PPID atas Penjelasan Tertulis
dari Permohonan Permintaan Informasi
.....

Dari :
Nama : Fungsiawan
NIK / NPWP 16 : 3171031306880006
Alamat : Apartemen Mediterania Palace C 8 E K , Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
Pekerjaan : Swasta / Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.....
HP / Email : 082149885829 / halo@pajaksmart.com
Nama Wajib Pajak :
NPWP 16 WP :

Kepada :
Nama : Yth. Direktur Jenderal Pajak
cq. Kepala Kanwil
cq. Kepala KPP
Alamat : KPP Pratama
Jl. Kel. Kec. Kota 00000
Telp / Email : Telp / no hp AR / Email

3 Keberatan

4 Jawaban T atas keberatan

taruh disini jawaban atas keberatan nya , copy paste tulisannya

Jawaban atas Keberatan

5 sengketa KIP

catatan

memulai terminal action : source .venv/bin/activate
python3 app.py

masuk ke veny : source .venv/bin/activate
baru masuk : python3 [app.py](#)

[BacotPurbaya.com](#)

Langkah rutin setiap kali mau menjalankan app:

```
cd ~/Documents/Pajaksmart-Webapp      # atau ke folder tempat proyekmu
source venv/bin/activate               # aktifkan virtual environment
python3 app.py                        # jalankan aplikasi
```

paling umum : python3 [app.py](#)

kalaupun lagi jalan, mau di stop : CTRL+C

ini penting supaya tidak buka port yg salah :

```
# =====
#  AUTO PORT (1x buka browser dengan port benar)
#  =====
if __name__ == "__main__":
    import threading
    import time

    def find_free_port(start_port=5002, max_tries=10):
        for port in range(start_port, start_port + max_tries):
            with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
                try:
                    s.bind(("0.0.0.0", port))
                    s.close()
                    return port
                except OSError:
                    continue
        raise RuntimeError("Tidak ada port kosong tersedia.")

    port = find_free_port()
    url = f"http://localhost:{port}"
    print(f"
```

```
app.run(host="0.0.0.0", port=port, debug=True)
```

OpenAI API Key

buat di website : <https://platform.openai.com/api-keys>

dibuat gl 25 okt 2025 :

name : ProjectAIPajaksmart

ini API nya :

sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA

export

OPENAI_API_KEY="sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA"

OPENAI_API_KEY=sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA

petunjuk untuk Pak Ilham

1. pastikan bisa berjalan di www , http, dan juga https
2. boleh dilakukan modifikasi kode apabila diperlukan, jangan mengubah struktur dan "ide" nya
3. sambil menunggu web app dari Pak Ilham jadi, inilah yang dijalankan dahulu
4. setelah web app dari Pa Ilham sudah jadi, nanti yang ini akan dibuang, gantikan punya Pak Ilham
- 5.

instruksi frontend

(gak usah liat ini) Gunakan file microsoft word karena **FORMULIS KIP KHUSUS** ada di foldernya :
https://drive.google.com/open?id=1ef0kbbO3EuC9ScjMpVY4V95N5yKspuLF&usp=drive_fs

jalankan di terminal utk menghasilkan file word docx. :

python3 generate_sengketa.py

(prompt to chatgpt)

prompt untuk mode canvas untuk menghasilkan surat Sengketa KIP

(prompt to chatgpt)-final ketika kode sudah jadi semua

Halo ayo kita membuat surat formulir sengketa KIP melalui tahap ini :

Langkah 1 : Saya akan kirim 5 file ke kamu

langkah 2 : kamu Membaca dan mengekstrak semua data penting dari file tersebut, kemudian Menyusun **hasil teks lengkap surat Formulir Sengketa KIP**, dan menampilkan hasil surat formulir sengketa KIP nya

langkah 3 : Setelah itu kamu **tanyakan ke saya apakah perlu revisi**. jika saya minta revisi

-->lakukan revisi, jika tidak revisi --> maka lanjut langkah berikutnya

langkah 4 : kalau sudah final, buat file DOCX nya untuk saya download

File yang perlu dikirimkan supaya proses generate dokumen bisa jalan:

1. surat 1 - Permohonan Informasi (PDF)
2. surat 2 - Jawaban Pejabat PPID (PDF)
3. surat 3 - Pernyataan Keberatan (PDF)
4. surat 4 - Jawaban atas keberatan (PDF)
5. Dokumen KTP Pemohon (PDF)
6. Surat kuasa Pemohon, jika ada (PDF)

hasilnya adalah :

7. Surat Formulir Sengketa KIP (Docx)

(prompt to chatgpt)

Instruksi langkah-langkah kerja :

langkah 1 : saya akan memberikan file dokumen pendukung, ada 6 file

- langkah 2 : saya akan memberikan kamu instruksi lengkapnya
- langkah 3 : Saya akan memberikan kamu informasi tambahan jika ada
- langkah 4 : saya memberi kamu format text isi surat lengkap
- langkah 4 : Kamu membuat kode python nya di kanvas, untuk menampilkan hasil akhirnya
- langkah 5 : konfirmasi ke saya, apakah sudah betul? atau mau direvisi kode nya ?
- langkah 5 : jika saya sudah setuju , maka lanjut tambahkan kode untuk mendownload dalam file docx dan pdf

1.

html web frontend : pajaksmart_webapp.html

- mari kita membuat aplikasi web berdasarkan langkah langkah ini :
- langkah 1 : membuat tampilan web dengan kode html di canvas
- langkah 2 : menambahkan kode python nya
- langkah 3 : testing dan revisi
- langkah 4 : setelah final, menyimpan web app ini supaya bisa dipakai di kemudian hari

Instruksi aplikasi web : namanya “Pajaksmart Webapp”

1. 1. tulisan di dalam tanda <> adalah instruksi atau informasi penting untuk kamu, tidak ditampilkan dalam front end nya.
2. 2. langkah 1. buatlah website interaktif, dengan kondisi ini:
3. **3. Struktur Navigasi :**

Tombol :

- “Diskusi Pajak” → <Menampilkan chatbot interaktif bersama ChatGPT>
 - “Lapor Pak Purbaya”
 - Jika tombol “Lapor Pak Purbaya” ini di klik, maka muncul dibawah nya :
 - Input teks : Nama Pelapor → placeholder : “Contoh : Suryo Utomo”
 - Input teks : Email Pelapor → placeholder : “Contoh : SuryoUtomo@gmail.com”
 - “Buat Pengaduan”
 - “Surat Biasa” → <membuat surat umum>
 - “Formulir Sengketa KIP”
 - **jika tombol “Formulir Sengketa KIP” di klik, maka muncul sub-tombol (gunakan metode dropdown)**
 - “Buat Surat Permintaan Informasi PPID”
 - “Buat Surat Keberatan kepada atasan PPID”
 - “Buat Formulir Sengketa KIP”
4. 4. Struktur tombol “**Buat Formulir Sengketa KIP**”

Input Teks

- Nama Pemohon → placeholder: “Contoh: Purbaya Yudhi Sadewa”
- Nomor Kontak Pemohon → placeholder: “Contoh : 0821xxxxx”
- Email Pemohon → placeholder: “contoh : emailAnda@gmail.com”
- Informasi Tambahan → textarea

Tombol upload

- Upload File 1 → Surat Permohonan Informasi (PDF)
- Upload File 2 → Jawaban Pejabat PPID (PDF)
- Upload File 3 → Pernyataan Keberatan (PDF)
- Upload File 4 → Jawaban atas Keberatan (PDF)

- Upload File 5 → File KTP dalam PDF (PDF)
- Upload File 6 → Surat Kuasa (jika ada-PDF)

Aksi:

“Buat Formulir Sengketa KIP Docx”

5. khusus tombol “Lapor Pak Purbaya” , setelah user mengisi nama pelapor dan email pelapor, kemudian klik “Buat Pengaduan” , maka akan redirect menuju website ini : <http://wa.me/+6282240406600> , dengan tulisan “Lapor Pak Purbaya - yyyy.mm.dd
Nama Pelapor : <Nama_Pelapor_Purbaya>
Email Pelapor : <Email_Pelapor_Purbaya>
Isi Pengaduan :
...tuliskan Pengaduan Anda disini...”

Struktur kerja [APP.PY](#)

- 1. Flask route “/generate-docx”**
 - menerima form input dan file upload
 - mengekstrak data dari PDF (pakai PyPDF2)
 - menggantikan semua placeholder < ... > dalam template_sengketa.txt
 - menghasilkan file DOCX format lengkap menggunakan python-docx
- 2. Fitur DOCX:**
 - font: Bookman Old Style, size 12pt
 - margin: 2 cm kiri-kanan-atas-bawah
 - line spacing: 1.0
 - <BOLD> dan <BOLD_END> → teks tebal
 - <underline> → teks bergaris bawah
 - <hr> → garis horizontal penuh
 - semua baris tampil meskipun kosong → diganti “—”
 - tidak perlu ada footer
 - ukuran kertas Folio (21,6 cm x 33 cm)
 - Nama file otomatis : Formulir_Sengketa_KIP_yyyymmdd_A.docx
 - file docx tidak perlu disimpan diam-diam di folder generated/ , tetapi langsung memunculkan dialog “Save As” untuk user memilih dia mau simpan file nya dimana di komputer si user.
- 3. Final Workflow**
 - User buka halaman web di browser (<http://127.0.0.1:5001>)
 - User isi data dan upload file
 - Klik tombol  “Buat Formulir Sengketa KIP Docx”
 - Flask langsung menjalankan python-docx:
 - baca isi template_sengketa.txt
 - isi semua placeholder dengan data input & hasil ekstraksi
 - hasilkan file DOCX lengkap, rapi, Bookman Old Style 12pt, Folio 2cm margin
 - Browser otomatis menampilkan dialog  Save As...”
(karena Flask mengirim file via send_file() dengan as_attachment=True)
- 4. Arsitektur Auto-fill**
 - Data seperti Nama, Tempat/Tgl Lahir, Alamat, Pekerjaan, Agama, NIK langsung diekstrak di backend.
 - Tanpa menampilkan apa pun di browser — disimpan diam-diam di variabel.
 - Saat user klik tombol “Buat Formulir Sengketa KIP Docx”, semua field <Nama_Pemohon>
 - <Alamat_Pemohon>, <tmpt_tgl_lahir_P>, <Agama>, <No_identitas>, <Pekerjaan> otomatis sudah terisi dari hasil OCR itu.
 - File DOCX langsung muncul di browser dengan dialog Save As....

OpenAI API Key

buat di website : <https://platform.openai.com/api-keys>

dibuat gl 25 okt 2025 :

name : ProjectAIPajaksmart

ini API nya :

sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA

export

OPENAI_API_KEY="sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA"

OPENAI_API_KEY=sk-proj-EAbiLZ-gR5G7rQFI2feVdeWYqV8c55Qq4dOkymtd9dRsrnTpBNiZttvgiC2uDEohKgKCWJncKT3BlbkFJuJJdr-rDW-X_AUDp4LgDBtI4GUuRdRnRbdiDMr-mJJdiSNGYpvnYcXjxyHA9-2rG8bsFyP5YIA

app.py

stabil 1 :

```
from flask import Flask, request, send_file, render_template_string
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI
from PyPDF2 import PdfReader
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
from docx.oxml import OxmlElement
from docx.oxml.ns import qn
from PIL import Image
import pytesseract, json, re, tempfile, os, socket, webbrowser

# =====
#  INISIALISASI
#  =====

load_dotenv()
client = OpenAI(api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY"))
app = Flask(__name__)

UPLOAD_DIR = Path("uploads")
UPLOAD_DIR.mkdir(exist_ok=True)

# =====
#  HELPER FUNCTION
#  =====

def extract_text_from_pdf(path):
    """Ekstrak teks dari file PDF"""
    try:
        reader = PdfReader(path)
        return "\n".join([page.extract_text() or "" for page in reader.pages]).strip()
    except Exception as e:
        return f"[Gagal membaca PDF: {e}]"

def extract_text_from_ktp(path):
    """Gunakan OCR untuk membaca teks dari KTP"""
    try:
        text = pytesseract.image_to_string(Image.open(path), lang="ind")
    except:
        text = pytesseract.image_to_string(Image.open(path), lang="eng")
    return text.strip()

def read_file(filename):
    """Baca file template atau instruksi"""
    try:
        return open(filename, "r", encoding="utf-8").read()
    except FileNotFoundError:
        return f"[File {filename} tidak ditemukan]"
```

```

def ask_chatgpt(prompt_text):
    """Kirim prompt ke ChatGPT API"""
    resp = client.responses.create(
        model="gpt-4o-mini",
        input=prompt_text,
        temperature=0.1
    )
    return resp.output[0].content[0].text.strip()

def clean_json_output(gpt_output):
    """Membersihkan output GPT agar bisa di-parse JSON"""
    clean = gpt_output.strip()
    clean = clean.replace("```json", "").replace("```", "")
    clean = clean.strip()
    start = clean.find("{")
    end = clean.rfind("}")
    if start >= 0 and end >= 0:
        clean = clean[start:end+1]
    return clean

# =====
# DOCX GENERATOR DENGAN FORMAT FOLIO RESMI
# =====

def create_docx_folio(text_data, output_path, ktp_path=None):
    """Buat file DOCX folio dengan format resmi"""
    doc = Document()

    # === Setup ukuran kertas ===
    section = doc.sections[0]
    section.page_height = Cm(33)
    section.page_width = Cm(21.6)
    section.left_margin = Cm(2)
    section.right_margin = Cm(2)
    section.top_margin = Cm(2)
    section.bottom_margin = Cm(2)

    # === Gaya font ===
    style = doc.styles["Normal"]
    style.font.name = "Bookman Old Style"
    style.font.size = Pt(12)
    style.paragraph_format.line_spacing = 1.0

    bold_active = False

    for raw_line in text_data.splitlines():
        line = raw_line.strip()
        if not line:
            doc.add_paragraph("-")
            continue

        # Baris kosong

```

```

if "<br>" in line:
    doc.add_paragraph("")
    continue

# Garis batas
if "<hr>" in line:
    p = doc.add_paragraph()
    run = p.add_run("-" * 100)
    run.bold = True
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
    continue

# Inline bold (misal: <BOLD>teks</BOLD>)
if "<BOLD>" in line and "</BOLD>" in line:
    parts = re.split(r"(<BOLD>|</BOLD>)", line)
    p = doc.add_paragraph()
    for part in parts:
        if part == "<BOLD>":
            bold_active = True
            continue
        elif part == "</BOLD>":
            bold_active = False
            continue
        if part.strip():
            r = p.add_run(part)
            r.bold = bold_active
    continue

# Bold-block multi-line
if "<BOLD>" in line:
    line = line.replace("<BOLD>", "")
    bold_active = True
if "</BOLD>" in line:
    line = line.replace("</BOLD>", "")
    bold_active = False

# Garis bawah
underline_flag = "<u>" in line
line = line.replace("<u>", "")

# Foto KTP
if "<Foto_KTP>" in line:
    p = doc.add_paragraph("Lampiran: Foto KTP Pemohon")
    if ktp_path and Path(ktp_path).exists():
        doc.add_picture(str(ktp_path), width=Cm(10))
    else:
        doc.add_paragraph("- (tidak ada foto KTP diunggah)")
    continue

# Tambahkan paragraf biasa
p = doc.add_paragraph()
r = p.add_run(line)

```

```

        r.bold = bold_active
        r.underline = underline_flag

# === Footer Halaman ===
footer = section.footer
p = footer.paragraphs[0]
p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
p.add_run("Hal ")
r = p.add_run()
fld1 = OxmlElement("w:fldChar"); fld1.set(qn("w:fldCharType"), "begin")
instr = OxmlElement("w:instrText"); instr.text = "PAGE"
fld2 = OxmlElement("w:fldChar"); fld2.set(qn("w:fldCharType"), "end")
r._r.append(fld1); r._r.append(instr); r._r.append(fld2)
p.add_run(" dari ")
r2 = p.add_run()
fld3 = OxmlElement("w:fldChar"); fld3.set(qn("w:fldCharType"), "begin")
instr2 = OxmlElement("w:instrText"); instr2.text = "NUMPAGES"
fld4 = OxmlElement("w:fldChar"); fld4.set(qn("w:fldCharType"), "end")
r2._r.append(fld3); r2._r.append(instr2); r2._r.append(fld4)

doc.save(output_path)
return output_path

# =====
# ROUTE FLASK
# =====
@app.route("/")
def index():
    html = open("pajaksmart_webapp.html", "r", encoding="utf-8").read()
    return render_template_string(html)

@app.route("/generate-docx", methods=["POST"])
def generate_docx():
    nama = request.form.get("nama", "")
    kontak = request.form.get("kontak", "")
    email = request.form.get("email", "")
    info = request.form.get("info", "")

    uploaded = {}
    for key in ["file1", "file2", "file3", "file4", "ktp", "kuasa"]:
        f = request.files.get(key)
        if f:
            path = UPLOAD_DIR / f.filename
            f.save(path)
            uploaded[key] = str(path)

# Ekstraksi PDF dan KTP
pdf_texts = ""
for key in ["file1", "file2", "file3", "file4"]:
    if key in uploaded:
        pdf_texts += f"\n\n### {key.upper()}:\n{extract_text_from_pdf(uploaded[key])}"

```

```

text_ktp = ""
if "ktp" in uploaded:
    text_ktp = extract_text_from_ktp(uploaded["ktp"])

instruction = read_file("instruction_sengketa.txt")
template = read_file("template_sengketa.txt")

full_prompt = f"""{instruction}

=== TEKS DARI DOKUMEN YANG DIUPLOAD ===
{text_ktp}
{pdf_texts}

Gunakan panduan di atas untuk mengisi semua placeholder di template.
Kembalikan hasil dalam format JSON valid.
"""

gpt_output = ask_chatgpt(full_prompt)
clean_json = clean_json_output(gpt_output)
try:
    parsed = json.loads(clean_json)
except Exception:
    parsed = {}

# Format tanggal otomatis
bulan_ina = {
    "January": "Januari", "February": "Februari", "March": "Maret",
    "April": "April", "May": "Mei", "June": "Juni", "July": "Juli",
    "August": "Agustus", "September": "September", "October": "Oktober",
    "November": "November", "December": "Desember"
}

today = datetime.now()
date_str = f"Jakarta, {today.day:02d} {bulan_ina[today.strftime('%B')]} {today.year}"
nomor_surat = f"{today.month:02d}{today.day:02d}A/KIP/2025"

# Mapping otomatis placeholder
mapping = {
    "<Nama_Pemohon>": nama,
    "<NomorKontakPemohon>": kontak,
    "<Email_Pemohon>": email,
    "<Alamat_Pemohon>": info,
    "<DATE_today>": date_str,
    "<Nomor_Surat>": nomor_surat,
}

for k, v in parsed.items():
    mapping[f"<{k}>"] = v

# Ganti semua tag di template
result_text = template
for k, v in mapping.items():
    result_text = result_text.replace(k, v)

```

```

# Hapus sisa tag yang belum terisi
result_text = re.sub(r"<[^>]+>", "-", result_text)
result_text = re.sub(r"\n{3,}", "\n\n", result_text)

output_path = Path(tempfile.gettempdir()) / f"Formulir_Sengketa_{today:%Y%m%d_%H%M%S}.docx"
create_docx_folio(result_text, output_path, uploaded.get("ktp"))

return send_file(output_path, as_attachment=True, download_name=output_path.name)

# =====
# AUTO PORT + AUTO OPEN BROWSER
# =====
if __name__ == "__main__":
    def find_free_port(start_port=5002, max_tries=10):
        for port in range(start_port, start_port + max_tries):
            with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
                try:
                    s.bind(("0.0.0.0", port))
                    s.close()
                    return port
                except OSError:
                    continue
        raise RuntimeError("Tidak ada port kosong yang tersedia.")

    port = find_free_port()
    url = f"http://localhost:{port}"
    print(f"🚀 Pajaksmart Webapp running at {url}")
    webbrowser.open(url)
    app.run(host="0.0.0.0", port=port, debug=True)

```

generate_sengketa.py

generate_sengketa.py

instruction_sengketa.txt

instruction_sengketa.txt
panduan lengkap untuk ChatGPT mengisi placeholder dokumen.

INSTRUKSI UNTUK MODEL AI

Tujuan:
Mengisi placeholder dalam template formulir sengketa informasi KIP secara lengkap dan benar berdasarkan isi file PDF dan KTP yang diunggah pengguna.

ATURAN UMUM:

1. Semua placeholder ditulis di dalam tanda kurung siku, misalnya <Nama_Pemohon>, <Alamat_Pemohon>, <REG>, dll.
2. Jika data tidak ditemukan di dokumen, ****jangan hapus field-nya.****
Gunakan tanda pengganti agar sistem Python tetap bisa membaca posisi field tersebut.
Contoh pengganti:
 - <font_size_14>—</font_size_14> untuk teks besar kosong
 - <BOLD>—</BOLD> untuk teks tebal kosong
 -
 untuk baris kosong
3. Gunakan Bahasa Indonesia formal sesuai standar surat resmi.
4. Tanggal ditulis dengan format: Jakarta, dd MMMM yyyy (contoh: Jakarta, 25 Oktober 2025).
5. Semua hasil dikembalikan dalam format JSON valid dengan pasangan "nama_field": "isi_data".
6. Jangan menambahkan komentar, penjelasan, atau teks di luar JSON.
7. Gunakan tanda baca dan kapitalisasi sesuai kaidah surat resmi.

CATATAN TAMBAHAN UNTUK FORMAT:

- Gunakan tanda “—” ****hanya di dalam field yang benar-benar kosong.****
Jangan menambahkan “—” untuk memisahkan baris, paragraf, atau heading.
- Gunakan
 jika hanya ingin membuat baris kosong tanpa tanda apa pun.
- Jangan menambahkan kata “Jakarta” atau nama kota secara manual di field tanggal (<DATE_today>, <REG_date>, <KEB_tanggal>), karena sistem otomatis menambahkannya.
- Setelah heading atau judul besar (misalnya <BOLD><font_size_14>PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</font_size_14></BOLD>), tambahkan satu baris kosong (
) agar hasil DOCX lebih rapi.
- Jika kuasa tidak ada, isi:
 - <Nama_Kuasa_Pemohon> = <BOLD>—</BOLD>
 - <Alamat_Kuasa_Pemohon> =

- Jangan menambahkan tanda “—” di awal atau akhir setiap baris, heading, atau paragraf.
Gunakan tanda “—” hanya untuk menggantikan isi field kosong yang benar-benar tidak memiliki data, misalnya jika NIK atau tanggal surat tidak ditemukan.
- Jangan menambahkan “—” di antara dua paragraf, setelah heading, atau di sekitar judul.
- Semua heading dan teks utama (misalnya <BOLD>Yth. Ketua...</BOLD>) harus ditulis tanpa tambahan tanda apa pun di kiri atau kanan.
- Jangan menulis tanda “—” di awal, akhir, atau di antara paragraf.
- Jangan menambahkan tanda “—” sebagai dekorasi atau pemisah.
- Jika tidak yakin, biarkan baris kosong saja tanpa tanda apapun.

Contoh yang benar:
<BOLD>Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia</BOLD>

Contoh yang salah:
—Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia—

INSTRUKSI PENGISIAN PLACEHOLDER (untuk ChatGPT):

- <DATE_today> → Tanggal hari ini, format: Jakarta, dd MMMM yyyy.
- <Nomor_Surat> → Format: mmdA/KIP/yyyy (contoh: 1023A/KIP/2025).
- <REG> → Nomor register permohonan informasi publik (contoh: REG-170/PPID.KK/2025).
- <KEB> → Nomor surat pernyataan keberatan (contoh: KEB-9/PPID.KK/2025).
- <Nama_Pemohon> → Nama lengkap dari KTP.
- <Alamat_Pemohon> → Alamat lengkap dari KTP.
- <tmpt_tgl_lahir_P> → Tempat dan tanggal lahir dari KTP.
- <Pekerjaan> → Pekerjaan dari KTP.
- <Agama> → Agama dari KTP.
- <NomorKontakPemohon> → Diisi dari form pengguna (jika ada).
- <Email_Pemohon> → Diisi dari form pengguna (jika ada).
- <No_identitas> → Nomor NIK dari KTP.
- <Nama_Kuasa_Pemohon> → Nama kuasa (jika tidak ada, gunakan tanda <BOLD>—</BOLD>).
- <Alamat_Kuasa_Pemohon> → Alamat kuasa (jika tidak ada, gunakan tanda <BOLD>—</BOLD>).
- <Nama_Badan_Publik> → Nama badan publik dari dokumen PDF (contoh: Kementerian Keuangan).
- <Unit_Kerja> → Unit kerja dari badan publik.
- <Alamat_unit_kerja> → Alamat atau situs badan publik.
- <REG_date> → Tanggal surat permohonan informasi diterima oleh PPID.
- <REG_Pejabat_yg_menerima> → Nama pejabat penerima surat permohonan.
- <Nomor_surat_penjelasan_tertulis> → Nomor surat tanggapan dari PPID.
- <Tanggal_surat_penjelasan_tertulis> → Tanggal surat tanggapan PPID.
- <PejabatygTtd_surat_penjelasan_tertulis> → Nama dan jabatan pejabat penandatanganan tanggapan PPID.
- <Alasan_Keberatan> → Isi alasan keberatan dari pemohon.
- <KEB_tanggal> → Tanggal surat pernyataan keberatan.
- <KEB_pejabat_menerima> → Nama pejabat penerima surat keberatan.
- <Tanggapan_Keberatan> → Isi tanggapan dari atasan PPID.
- <TanggapanKeberatan_Nomor> → Nomor surat tanggapan keberatan.
- <TanggapanKeberatan_Tanggal> → Tanggal surat tanggapan keberatan.
- <TanggapanKeberatan_PejabatygTtd> → Nama dan jabatan pejabat penandatanganan tanggapan keberatan.
- <Pejabat_PPID> → Jabatan pejabat PPID.
- <Atasan_Pejabat_PPID> → Jabatan atasan pejabat PPID.
- <c23> → Jika ada penolakan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, tulis (); jika tidak, tulis (...).
- <d3Surat_Kuasa> → Jika ditemukan surat kuasa, tulis ()Surat Kuasa; jika tidak, tulis (...)Surat Kuasa.
- <isi_Informasi_yang_dimohon> → Isi lengkap permintaan informasi dari pemohon.
- <Isi_Pemberitahuan_Tertulis_PPID> → Isi lengkap surat jawaban PPID.
- <hr> → Garis batas horizontal.
- <BOLD>...</BOLD> → Teks di antara dua tanda ini dibuat tebal.
- <u>...</u> → Teks di antara dua tanda ini digarisbawahi.
- <satu_baris_kosong> → Satu baris kosong (baris baru).
- <font_size_14>...</font_size_14> → Teks di antara dua tanda ini ukuran hurufnya 14 pt.

OUTPUT:
Kembalikan hasil dalam format JSON valid.
Contoh:

```
{
  "Nama_Pemohon": "Fungsiawan",
  "Alamat_Pemohon": "APT. MDT PALACE UNIT B/23 C/K RT/RW 010/013, Kel. Kebon Kosong, Kec.
Kemayoran, Jakarta Pusat",
  "tmpt_tgl_lahir_P": "Singkawang, 13 Juni 1988",
  "Agama": "Buddha",
  "REG": "REG-170/PPID.KK/2025",
  "KEB": "KEB-26/PPID.KK/2025",
  "Nama_Badan_Publik": "Kementerian Keuangan"
}
```

INSTRUKSI UNTUK MODEL AI (OLD - TIDAK PAKAI LAGI)

Tujuan: Mengisi placeholder dalam template formulir sengketa informasi KIP secara lengkap dan benar berdasarkan isi file PDF dan KTP yang diunggah pengguna.

Aturan Umum:

- 1. Semua placeholder ditulis di dalam tanda kurung siku, misalnya <Nama_Pemohon>, <Alamat_Pemohon>, <REG>, dll.
- 2. Jika data tidak ditemukan di dokumen, biarkan kosong saja
- 3. Gunakan Bahasa Indonesia formal sesuai standar surat resmi.
- 4. Tanggal ditulis dengan format: Jakarta, dd MMMM yyyy (contoh: Jakarta, 25 Oktober 2025).
- 5. Semua hasil harus dikembalikan dalam format JSON dengan pasangan "nama_field": "isi_data".

Instruksi Pengisian Placeholder : (utk chatgpt)

- <DATE_today> : → ditulis dalam format: Jakarta, dd mmm yyyy (contoh: Jakarta, 23 Oktober 2025). tanggal nya adalah tanggal pada hari surat ini dibuat
- <Nomor_Surat> : → diisi dengan format: mmddA/KIP/2025 , mm = bulan saat ini (contoh: Oktober ditulis 10), dd = tanggal hari ini (contoh: 23), A = kode surat pertama pada tanggal tersebut (surat kedua di hari sama gunakan kode B, dst.). contoh : 1023A/KIP/2025
- <REG> → nomor register permohonan informasi publik (misal: REG-170/[PPID.KK/2025](#) atau REG-121/PPID.KK/2025 atau REG-85/PPID.PJ/2025).
- <KEB> → nomor surat pernyataan keberatan kepada atasan pejabat PPID (misal: KEB-9/PPID.KK/2025 atau KEB-26/PPID.KK/2025 atau KEB-15/[PPID.PJ/2025](#)).
- <Nama_Pemohon> → nama lengkap dari KTP (misal : Fungsiawan)
- <Alamat_Pemohon> → alamat lengkap dari KTP (Contoh : APT. MDT PALACE UNIT B/23 C/K RT/RW 010/013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630)
- <tmpt_tgl_lahir_P> → tempat dan tanggal lahir dari KTP.
- <Pekerjaan> → pekerjaan dari KTP.
- <Agama> → agama dari KTP.
- <NomorKontakPemohon> → diisi dari form pengguna (jika ada).
- <Email_Pemohon> → diisi dari form pengguna (jika ada).
- <No_identitas> → nomor NIK dari KTP (Contoh : 3171031306880006)
- <Nama_Kuasa_Pemohon> → nama kuasa jika ada; jika tidak ada, tulis —.
- <Alamat_Kuasa_Pemohon> → alamat kuasa jika ada; jika tidak ada, tulis —.
- <Nama_Badan_Publik> → nama badan publik dari dokumen PDF permohonan informasi (contoh : Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak)
- <Unit_Kerja> → unit kerja dari badan publik. (contoh : PPID Kementerian Keuangan atau PPID Direktorat Jenderal Pajak)
- <Alamat_unit_kerja> → alamat atau situs badan publik (misal: Submit di website <https://e-ppid.kemenkeu.go.id>).
- <REG_date> → tanggal surat permohonan informasi diterima oleh PPID, diambil dari file PDF yang diupload.
- <REG_Pejabat_yg_menerima> → nama pejabat penerima surat permohonan, diambil dari file PDF yang diupload, kosongkan saja jika tidak terdapat informasi tersebut di file PDF (contoh : Eva/Paryoto)
- <Nomor_surat_penjelasan_tertulis> → nomor surat tanggapan(penjelasan tertulis) dari pejabat PPID, diambil dari file PDF yang diupload. (misal : S-287/SJ.6/SJ.65/2025)
- <Tanggal_surat_penjelasan_tertulis> → tanggal surat tanggapan (penjelasan tertulis) PPID, diambil dari file PDF yang diupload.
- <Pejabatygtd_surat_penjelasan_tertulis> → nama dan jabatan pejabat penandatanganan tanggapan PPID, diambil dari file PDF yang diupload. (misal : Titi Susanti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Kementerian Keuangan u.b. Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi)
- <Alasan_Keberatan> → isi alasan keberatan dari pemohon, diambil dari file PDF yang diupload.

- <KEB_tanggal> → tanggal surat pernyataan keberatan diambil dari file PDF yang diupload.
- <KEB_pejabat_menerima> → nama pejabat atau petugas informasi yang menerima surat keberatan, diambil dari file PDF yang diupload. (misal : Shanti)
- <Tanggapan_Keberatan> → isi tanggapan dari atasan pejabat PPID, diambil dari file PDF yang diupload.
- <TanggapanKeberatan_Nomor> → nomor surat tanggapan keberatan. (misal S-157/SJ/2025 atau S-31/PJ/PJ.09/2025)
- <TanggapanKeberatan_Tanggal> → tanggal surat tanggapan keberatan.
- <TanggapanKeberatan_PejabatygTtd> → nama dan jabatan pejabat penandatangan tanggapan keberatan.(Contoh : Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kementerian Keuangan)
- <Pejabat_PPID> → nama jabatan PPID. (misal : Pejabat PPID Kementerian Keuangan atau Pejabat PPID Direktorat Jenderal Pajak)
- <Atasan_Pejabat_PPID> → nama jabatan atasan pejabat PPID. (misal : Atasan Pejabat PPID Kementerian Keuangan atau Atasan Pejabat PPID Direktorat Jenderal Pajak)
- <c23✔> → jika ada penolakan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, tulis (✔); jika tidak, tulis (...).
- <d3✔Surat_Kuasa> → jika ditemukan surat kuasa, tulis (✔)Surat Kuasa; jika tidak ada, tulis (...)Surat Kuasa.
- <isi_Informasi_yang_dimohon> → isi lengkap permintaan informasi dari pemohon (salin teks khusus informasi yang diminta saja).
- <Isi_Pemberitahuan_Tertulis_PPID> → isi lengkap surat jawaban PPID (salin teks khusus tanggapan atas poin poin permintaan informasi saja)
- <hr> → garis batasa horizontal
- <BOLD>...</BOLD> → Text di antara dua tanda ini dibuat format teks tebal
- <u>...</u> → teks di antara dua tanda ini digarispawahi.
- <satu_baris_kosong> → satu baris kosong (br)
- <font_size_14>...</font_size_14> → teks diantara dua tanda ini ukurannya 14
- Jika suatu field tidak tersedia, jangan hilangkan barisnya. Tuliskan tanda pengganti menggunakan format Python berikut: <font_size_14>—</font_size_14> untuk teks besar, atau <BOLD>—</BOLD> untuk teks tebal kosong, atau
 untuk baris kosong

Output:
Kembalikan hasil dalam format JSON yang valid.
Contoh:

```
{
  "Nama_Pemohon": "Fungsiawan",
  "Alamat_Pemohon": "APT. MDT PALACE UNIT B/23 C/K RT/RW 010/013, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat",
  "tmpt_tgl_lahir_P": "Singkawang, 13 Juni 1988",
  "Agama": "Buddha",
  "REG": "REG-170/PPID.KK/2025",
  "KEB": "KEB-26/PPID.KK/2025",
  "Nama_Badan_Publik": "Kementerian Keuangan",
  ...
}
```

Instruksi docx : untuk Python : di [app.py](#) di bagian **create_docx_folio()**

- : → ukuran tulisannya 14
- gunakan kertas ukuran FOLIO dengan margin left 2cm right 2cm top 2 cm bottom 2cm
- gunakan font bookman old style ukuran 12, kecuali saya memberitahu <font_size_14>
- line and paragraph spacing → 1,0

pajaksmart_webapp.html

pajaksmart_webapp.html

tampilan antarmuka web lengkap dengan bagian chat, laporan, dan form unggah file.

pada tombol "Diskusi Pajak" , saya mau membuatnya menjadi chatbot chatgpt biasa, yang terhubung langsung dengan server chatgpt dengan API key saya, bagaimana caranya ?

stabil 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Pajaksmart Webapp</title>
  <style>
    body {
      font-family: "Bookman Old Style", serif;
      background-color: #f6f8fb;
      color: #333;
      margin: 0;
      padding: 0;
      scroll-behavior: smooth;
    }
    header {
      background-color: #004aad;
      color: white;
      text-align: center;
      padding: 20px;
      font-size: 24px;
      letter-spacing: 1px;
      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    main {
      max-width: 900px;
      margin: 30px auto;
      padding: 25px;
      background: white;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h2 {
      color: #004aad;
      margin-top: 40px;
      border-bottom: 2px solid #004aad;
      padding-bottom: 8px;
    }
    button {
      background-color: #004aad;
      color: white;
      padding: 10px 18px;
      border: none;
      border-radius: 6px;
      cursor: pointer;
```

```
margin: 8px 6px 8px 0;
transition: background 0.3s;
font-size: 14px;
}
button:hover { background-color: #002f6c; }
.hidden { display: none; }
.input-group { margin: 10px 0; }
.input-group label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 4px;
}
input, textarea {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
  font-size: 14px;
}
textarea { resize: vertical; height: 80px; }
.upload-label {
  font-weight: bold;
  margin-top: 10px;
  display: block;
}
.dropdown {
  position: relative;
  display: inline-block;
}
.dropdown-content {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #fff;
  min-width: 250px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.15);
  border-radius: 8px;
  z-index: 1;
}
.dropdown-content button {
  width: 100%;
  background: white;
  color: #004aad;
  text-align: left;
  padding: 10px 15px;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}
.dropdown-content button:hover {
  background-color: #004aad;
  color: white;
}
.dropdown:hover .dropdown-content { display: block; }
```

```

/* ChatGPT-style bubbles */
.user-bubble {
  background-color: #d1f7c4;
  align-self: flex-end;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 12px;
  max-width: 70%;
  text-align: right;
  white-space: pre-wrap;
  word-wrap: break-word;
  animation: fadeIn 0.3s ease-in;
}

.bot-bubble {
  background-color: #e6e6e6;
  align-self: flex-start;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 12px;
  max-width: 75%;
  text-align: left;
  white-space: pre-wrap;
  word-wrap: break-word;
  animation: fadeIn 0.3s ease-in;
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(8px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
</style>
</head>

<body>
  <header>Pajaksmart Webapp</header>

  <main>
    <!-- Navigasi utama -->
    <section id="nav-section">
      <button onclick="toggleSection('diskusiPajak')">Diskusi Pajak</button>
      <button onclick="toggleSection('laporPurbaya')">Lapor Pak Purbaya</button>
      <button onclick="toggleSection('suratBiasa')">Surat Biasa</button>

      <div class="dropdown">
        <button>Formulir Sengketa KIP ▼</button>
        <div class="dropdown-content">
          <button onclick="toggleSection('suratPermintaan')">Buat Surat Permintaan Informasi
PPID</button>
          <button onclick="toggleSection('suratKeberatan')">Buat Surat Keberatan kepada Atasan
PPID</button>
          <button onclick="toggleSection('buatFormulirKIP')">Buat Formulir Sengketa KIP</button>
        </div>
      </div>
    </section>

```

```
<!-- Diskusi Pajak -->
<section id="diskusiPajak" class="hidden">
  <h2>💬 Diskusi Pajak</h2>

  <div id="chatBox" style="border:1px solid #ccc; border-radius:8px; padding:10px; height:420px;
overflow-y:auto; background:#fafafa; display:flex; flex-direction:column; gap:10px;">
    <div id="chatMessages">
      <div class="bot-bubble">Halo! Saya asisten pajak Pajaksmart. Silakan tanya apa pun seputar
pajak 😊</div>
    </div>
  </div>

  <div style="margin-top:10px; display:flex; gap:8px;">
    <input id="userInput" type="text" placeholder="Tulis pertanyaan pajak Anda di sini..."
style="flex:1; padding:10px; border:1px solid #ccc; border-radius:6px;">
    <button type="button" onclick="kirimChat()">Kirim</button>
  </div>
</section>

<!-- Lapor Pak Purbaya -->
<section id="laporPurbaya" class="hidden">
  <h2>🗣️ Lapor Pak Purbaya</h2>
  <div class="input-group">
    <label>Nama Pelapor</label>
    <input type="text" id="namaPelapor" placeholder="Contoh: Purbaya Yudhi Sadewa" required>
  </div>
  <div class="input-group">
    <label>Email Pelapor</label>
    <input type="email" id="emailPelapor" placeholder="Contoh: purbaya2029wapres@gmail.com"
required>
  </div>
  <div class="input-group">
    <label>Siapa Terlapor</label>
    <textarea id="namaterlapor" placeholder="Contoh: Sri Mulyani (Kepala KPP Pratama Konoha)"
required></textarea>
  </div>
  <div class="input-group">
    <label>Isi Pengaduan Anda</label>
    <textarea id="isiPengaduanAnda" placeholder="Contoh: Saya Diperas Oknum KPP Konoha disuruh
bayar Rp. 300 Ribu di Jam 5 Pagi" required></textarea>
  </div>
  <button type="button" onclick="buatPengaduan()">Buat Pengaduan</button>
</section>

<!-- Surat Biasa -->
<section id="suratBiasa" class="hidden">
  <h2>Surat Biasa</h2>
  <p>Fitur pembuatan surat umum otomatis akan ditambahkan di sini.</p>
</section>

<!-- Formulir Sengketa KIP -->
```

```
<section id="buatFormulirKIP" class="hidden">
  <h2>Buat Formulir Sengketa KIP Setelah Mendapatkan Jawaban atas Keberatan</h2>
  <h3>(Khusus Kemenkeu - Permintaan Informasi sd Keberatan ajukan di
https://e-ppid.kemenkeu.go.id)</h3>

  <form id="formSengketa" action="/generate-docx" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <div class="input-group">
      <label>Nama Pemohon</label>
      <input type="text" name="nama" placeholder="Contoh: Purbaya Yudhi Sadewa" required>
    </div>

    <div class="input-group">
      <label>Nomor Kontak Pemohon</label>
      <input type="text" name="kontak" placeholder="Contoh: 0821xxxxx" required>
    </div>

    <div class="input-group">
      <label>Email Pemohon</label>
      <input type="email" name="email" placeholder="contoh: emailAnda@gmail.com" required>
    </div>

    <div class="input-group">
      <label>Informasi Tambahan</label>
      <textarea name="info" placeholder="Tambahkan keterangan tambahan di sini..."></textarea>
    </div>

    <label class="upload-label">Upload File 1 - Surat Permohonan Informasi (PDF)</label>
    <input type="file" name="file1" accept="application/pdf">

    <label class="upload-label">Upload File 2 - Jawaban Pejabat PPID (PDF)</label>
    <input type="file" name="file2" accept="application/pdf">

    <label class="upload-label">Upload File 3 - Pernyataan Keberatan (PDF)</label>
    <input type="file" name="file3" accept="application/pdf">

    <label class="upload-label">Upload File 4 - Jawaban atas Keberatan (PDF)</label>
    <input type="file" name="file4" accept="application/pdf">

    <label class="upload-label">Upload File 5 - KTP (PDF)</label>
    <input type="file" name="ktp" accept="application/pdf">

    <label class="upload-label">Upload File 6 - Surat Kuasa (jika ada, PDF)</label>
    <input type="file" name="kuasa" accept="application/pdf">

    <div style="margin-top:25px;">
      <button type="submit">Buat Formulir Sengketa KIP Docx</button>
    </div>
  </form>
</section>
</main>

<script>
```

```

function toggleSection(id) {
  document.querySelectorAll("section").forEach(sec => {
    if (sec.id !== "nav-section") sec.classList.add("hidden");
  });
  document.getElementById(id).classList.remove("hidden");
}

// Chat interaktif + animasi mengetik
async function kirimChat() {
  const input = document.getElementById("userInput");
  const pesan = input.value.trim();
  if (!pesan) return;

  const chatBox = document.getElementById("chatMessages");

  const userDiv = document.createElement("div");
  userDiv.className = "user-bubble";
  userDiv.textContent = pesan;
  chatBox.appendChild(userDiv);
  input.value = "";

  const typingDiv = document.createElement("div");
  typingDiv.className = "bot-bubble";
  typingDiv.textContent = "ChatGPT Pajak sedang mengetik...";
  chatBox.appendChild(typingDiv);
  chatBox.scrollTo({ top: chatBox.scrollHeight, behavior: "smooth" });

  try {
    const response = await fetch("/chat", {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify({ message: pesan })
    });
    const data = await response.json();
    typingDiv.remove();

    const botDiv = document.createElement("div");
    botDiv.className = "bot-bubble";
    chatBox.appendChild(botDiv);

    // animasi mengetik satu per satu
    let reply = data.reply
      .replace(/^\s*[\d\-\.\*]+\s*/gm, "")
      .replace(/\*\*(.*?)\*/g, "$1")
      .replace(/[_`]/g, "");
    let i = 0;
    const interval = setInterval(() => {
      botDiv.textContent += reply[i];
      i++;
      chatBox.scrollTo({ top: chatBox.scrollHeight, behavior: "smooth" });
      if (i >= reply.length) clearInterval(interval);
    }, 20);
  }
}

```

```
    } catch (err) {
        typingDiv.textContent = "⚠️ Gagal terhubung ke server.";
    }
}

// WhatsApp reporter
function buatPengaduan() {
    const nama = document.getElementById("namaPelapor").value.trim();
    const email = document.getElementById("emailPelapor").value.trim();
    const terlapor = document.getElementById("namaterlapor").value.trim();
    const isi = document.getElementById("isiPengaduanAnda").value.trim();
    const tanggal = new Date().toISOString().slice(0, 10).replace(/-/g, '.');

    if (!nama || !email || !isi) {
        alert("Mohon isi semua kolom sebelum mengirim pengaduan.");
        return;
    }

    const pesan = `Lapor Pak Purbaya - ${tanggal}\nSiapa Pelapor : \nNama : ${nama}\nEmail :
${email}\n\nSiapa Terlapor : \n${terlapor}\n\nIsi Pengaduan : \n${isi}`;
    const encodedPesan = encodeURIComponent(pesan);
    const link = `https://wa.me/62822240406600?text=${encodedPesan}`;
    window.open(link, "_blank");
}
</script>
</body>
</html>
```

template_sengketa

template_sengketa.txt
template DOCX untuk formulir sengketa informasi KIP.

Tanggal : <DATE_today>
Nomor : <Nomor_Surat>
Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas <REG> dan <KEB> pada <Pejabat_PPID> dan <Atasan_Pejabat_PPID>

<BOLD>Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia</BOLD>
Wisma BSG Gedung Annex, Lt. 1, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp & Fax: 021-34830741, Fax: 021-3451734
Website: www.komisiinformasi.co.id; <https://sipsi.komisiinformasi.go.id/>
Email: sekretariat@komisiinformasi.go.id; kepaniteraan@komisiinformasi.go.id; kepaniteraankip@gmail.com

<BOLD>PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</BOLD>

<BOLD>A. IDENTITAS PEMOHON</BOLD>
Nama : <Nama_Pemohon>
Jenis Kelamin : (☒)Laki-laki/(...)Perempuan/(...)Badan Hukum
Alamat Lengkap : <Alamat_Pemohon>
Tempat/Tanggal Lahir : <tmpt_tgl_lahir_P>
Pekerjaan : <Pekerjaan>
Agama : <Agama>
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : <NomorKontakPemohon>
Rumah : Sama
Kantor : Sama
HP : <NomorKontakPemohon>
Email : <Email_Pemohon>
Tanda Bukti Identitas : (☒)KTP/(...)SIM/(...)Paspor/(...)Akta Pendirian
No. Identitas : <No_identitas>
<hr>

<BOLD>B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)</BOLD>
Nama : <Nama_Kuasa_Pemohon>
Jenis Kelamin : (...)Laki-laki/(...)Perempuan/(...)Badan Hukum
Alamat Lengkap : <Alamat_Kuasa_Pemohon>
<hr>

<BOLD>C.0. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI</BOLD>
Nama Badan Publik : <Nama_Badan_Publik>
Unit Kerja : <Unit_Kerja>
Alamat : <Alamat_unit_kerja>
<hr>

<BOLD>C.1. Informasi yang dimohon :</BOLD>
<isi_Informasi_yang_dimohon>
(dokumen terlampir)
Nomor Register Permohonan : <REG>

Tanggal Register Permohonan : <REG_date>
Pejabat/Petugas yang Menerima : <REG_Pejabat_yg_menerima>
<hr>

<BOLD>C.2. Jawaban atas Permohonan Informasi :</BOLD>
<Isi_Pemberitahuan_Tertulis_PPID>
Nomor Surat Penjelasan Tertulis : <Nomor_surat_penjelasan_tertulis>
Tanggal Surat Penjelasan Tertulis : <Tanggal_surat_penjelasan_tertulis>
Pejabat yang Menandatangani Jawaban : <Pejabatygtttd_surat_penjelasan_tertulis>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD>C.3. Alasan Keberatan :</BOLD>
<Alasan_Keberatan>
Nomor Register Surat Keberatan : <KEB>
Tanggal Surat Keberatan : <KEB_tanggal>
Pejabat/Petugas yang Menerima : <KEB_pejabat_menerima>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD>C.4. Tanggapan atas Keberatan :</BOLD>
<Tanggapan_Keberatan>
Nomor Surat Jawaban atas Keberatan : <TanggapanKeberatan_Nomor>
Tanggal Surat Jawaban atas Keberatan : <TanggapanKeberatan_Tanggal>
Pejabat yang Menandatangani Tanggapan : <TanggapanKeberatan_PejabatygTtd>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD>C.5. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi:</BOLD>
<c23✔>Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.
<(…)Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP.
(…)Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
(✔)Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.
(…)Penaan biaya yang tidak wajar.
(…)Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.
<hr>

<BOLD>C.6. Tuntutan Pemohon :</BOLD>
Memohon agar Komisi Informasi Pusat memutuskan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon.
<hr>

<BOLD>D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN</BOLD>
Salinan Identitas
(✔)KTP/(…)SIM/(…)Paspur/(…)Akta Pendirian
<d3✔Surat_Kuasa>
(✔)Jawaban PPID terhadap Permohonan Informasi
<hr>

Tanda Bukti Pengajuan Permohonan
(✔)Surat permohonan/formulir permohonan yang disediakan Badan Publik/tanda terima
(✔)Pemberitahuan tertulis

<hr>

Tanda Bukti Pengajuan Keberatan

- (☒) Surat pengajuan keberatan/formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/tanda terima
- (☒) Tanggapan Atasan PPID atas keberatan

Dokumen Pendukung Lainnya : -

<BOLD>Pernyataan Pemohon</BOLD>

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Pusat tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
2. Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat.
3. Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Komisi Informasi Pusat berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini.

Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak mana pun.

<hr>

Tanggal Pengajuan Permohonan

<DATE_today>
<satu_baris_kosong>
<satu_baris_kosong>
<satu_baris_kosong>
<u><Nama_Pemohon></u>

Prinsipal Pemohon

<hr>

Tanggal Terima

Jakarta,
Staf PSI KI Pusat
<satu_baris_kosong>
<satu_baris_kosong>
<satu_baris_kosong>
.....

old gak pakai

Tanggal : <DATE_today>
Nomor : <Nomor_Surat>
Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas <REG> dan <KEB> pada <Pejabat_PPID> dan <Atasan_Pejabat_PPID>

<BOLD>Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia</BOLD>
Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp & Fax 021-34830741 Fax 021-3451734
Website: www.komisiinformasi.co.id; https://sipsi.komisiinformasi.go.id/
email: sekretariat@komisiinformasi.go.id ; kepaniteraan@komisiinformasi.go.id ;
kepaniteraankip@gmail.com

<BOLD><font_size_14>PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI</font_size_14></BOLD>

<BOLD>A. IDENTITAS PEMOHON</BOLD>

Nama : <Nama_Pemohon>
Jenis Kelamin : (☒)Laki-laki/(...)perempuan/(...)Badan Hukum
Alamat Lengkap : <Alamat_Pemohon>
Tempat/Tanggal Lahir : <tmpt_tgl_lahir_P>
Pekerjaan : <Pekerjaan>
Agama : <Agama>
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : <NomorKontakPemohon>
Rumah : Sama
Kantor : Sama
HP : <NomorKontakPemohon>
Email : <Email_Pemohon>
Tanda Bukti Identitas : (☒)KTP/(...)SIM/(...)Paspor/(...)Akta Pendirian
No. Identitas : <No_identitas>
<hr>

<BOLD>B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)</BOLD>

Nama : <Nama_Kuasa_Pemohon>
Jenis Kelamin : (...)Laki-laki/(...)perempuan/(...)Badan Hukum
Alamat Lengkap : <Alamat_Kuasa_Pemohon>
<hr>

<BOLD>C.0 MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI</BOLD>

Nama Badan Publik : <Nama_Badan_Publik>
Unit Kerja : <Unit_Kerja>
Alamat : <Alamat_unit_kerja>
<hr>

<BOLD>C.1. Informasi yang dimohon : </BOLD>

<isi_Informasi_yang_dimohon>
(dokumen terlampir)
Nomor Register Permohonan : <REG>
Tanggal Register Permohonan : <REG_date>

Pejabat/Petugas yang Menerima : <REG_Pejabat_yg_menerima>
<hr>

<BOLD>C.2. Jawaban atas Permohonan Informasi : </BOLD>

<Isi_Pemberitahuan_Tertulis_PPID>
Nomor Surat Penjelasan Tertulis : <Nomor_surat_penjelasan_tertulis>
Tanggal Surat Penjelasan Tertulis : <Tanggal_surat_penjelasan_tertulis>
Pejabat yang Menandatangani Jawaban : <PejabatygTtd_surat_penjelasan_tertulis>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD>C.3. Alasan Keberatan : </BOLD>

<Alasan_Keberatan>
Nomor Register Surat Keberatan : <KEB>
Tanggal Surat Keberatan : <KEB_tanggal>
Pejabat/Petugas yang Menerima : <KEB_pejabat_menerima>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD> C.4. Tanggapan atas Keberatan : </BOLD>

<Tanggapan_Keberatan>
Nomor Surat Jawaban atas keberatan : <TanggapanKeberatan_Nomor>
Tanggal Surat Jawaban atas keberatan : <TanggapanKeberatan_Tanggal>
Pejabat yang Menandatangani Tanggapan : <TanggapanKeberatan_PejabatygTtd>
(dokumen terlampir)
<hr>

<BOLD>C.5. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi:</BOLD>

<c23✔>Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
<(…)>Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU
KIP.
(…)Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
(✔)Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.
(…)Penaan biaya yang tidak wajar.
(…)Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP.
<hr>

<BOLD>C.6. Tuntutan Pemohon : </BOLD>

Memohon agar Komisi Informasi Pusat memutuskan :
1. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon
oleh pemohon.
<hr>

<BOLD>D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN</BOLD>

Salinan Identitas
(✔)KTP/(…)SIM/(…)Paspor/(…)Akta Pendirian
<d3✔>Surat_Kuasa>
(✔)Jawaban PPID terhadap Permohonan Informasi
<hr>
Tanda Bukti Pengajuan Permohonan
(✔) Surat permohonan/formulir permohonan yang disediakan Badan Publik/tanda terima
(✔)Pemberitahuan tertulis
<hr>

Tanda Bukti Pengajuan Keberatan

() Surat pengajuan keberatan/formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/tanda terima

() Tanggapan Atasan PPID atas keberatan

Dokumen Pendukung Lainnya : -

Pernyataan Pemohon

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Pusat tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
2. Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat.
3. Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Komisi Informasi Pusat berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini.

Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.

<hr>

Tanggal Pengajuan Permohonan

<DATE_today>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<u><Nama Pemohon></u>

Prinsipal Pemohon

<hr>

Tanggal Terima

Jakarta,

Staf PSI KI Pusat

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

<satu_baris_kosong>

.....

Requirement.txt

requirement.txt

dependensi dasar Flask + OCR + DOCX.

 PP Pengadilan Pajak

sudah ada master khusus PN disini :

<https://docs.google.com/document/d/1f2VGbi79J8EUbpy-jlluGnkBjPtXc05Qwv1NRvki8n4/edit?tab=t.devt1kff1mpv>

 PN Pengadilan Negeri

sudah ada master khusus PP ini :

https://docs.google.com/document/d/1xeKCyrD4N-OYEWZ8fqSgv_uxqAeIWxZIlk-FR_OLO5A/edit?pli=1&tab=t.utsjki04hq



JR MK Mahkamah Konstitusi

file master khusus JR MK disini :

<https://docs.google.com/document/d/1MJci5CgO7pvWx5CsxHAkCqyv7mFmZb1qYzMBtJ2Dzgl/edit?tab=t.vvppk7fzawv1>

RUPS PTP non notaris

Nomor : RUPS-2026.02.12A
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Hal : Keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan

Bersama ini, Perseroan Perorangan melaksanakan **Keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan** Sebagai Berikut :

- 1. Bahwa Pasal 13 ayat (2) huruf a, PP 8 2021 berbunyi : berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham;
- 2. Bahwa Keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan tidak mewajibkan akta notaris;
- 3. Perseroan Perorangan melaksanakan keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Keputusan	Nilai rupiah
1	Prive / Dividen an. ...namadirektur...	100.000.000
2		
3		
Total		100.000.000

Demikian untuk diketahui para pihak.

ttd & stempelPTP

NamaDirketur
Direktur

Keberatan Adm IKH

Surat Keberatan

Jakarta, 16 Maret 2026

Nomor : 0420A/KEB.ADM/2026
Lampiran : 8 (Delapan) Dokumen
Perihal : **Keberatan Administrasi atas Tindakan Faktual dalam Proses Administrasi Permohonan IKH**

Yth. **Ketua Pengadilan Pajak**
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat, 10120,
DKI Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama KH
NPWP16 : 000000000000000000
Alamat : Alamat KH
HP / Email : No HP KH / Email

dalam hal ini bertindak selaku :

☒ Wajib Pajak; ☐ Wakil; ☐ Kuasa;

Dengan ini menyampaikan keberatan administrasi atas tindakan faktual yang terjadi dalam proses administrasi di Pengadilan Pajak terkait dengan permohonan Izin Kuasa Hukum (IKH) Perpajakan.

Adapun kronologi kejadian adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kejadian	Keterangan
1.	8 Oktober 2025	Saya telah mengajukan permohonan Izin Kuasa Hukum (IKH) kepada Pengadilan Pajak melalui aplikasi IKH Online. (Bukti-1)	Atas permohonan Saya tercatat nomor registrasi REG20251934 dan telah terbit Bukti Penerimaan Elektronik .
2.	9 Oktober 2025	Sekretariat Pengadilan Pajak melalui surat elektronik menyampaikan bahwa permohonan IKH yang saya ajukan telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap . (Bukti-2)	Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Sekretariat Pengadilan Pajak melalui Email dengan perihal <i>Pengajuan IKH Telah Diverifikasi</i> , permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan oleh saya telah dilakukan penelitian oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan dinyatakan lengkap karena telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 serta Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024. (Bukti-2)

No.	Tanggal	Kejadian	Keterangan
3.	26 Februari 2026	Permohonan yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap pada tanggal 11 Februari 2026 dikembalikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak untuk dilakukan perbaikan.	Bahwa berdasarkan pemberitahuan Sekretariat Pengadilan Pajak melalui surat elektronik, permohonan Izin Kuasa Hukum yang saya ajukan dikembalikan untuk dilengkapi karena terdapat kesalahan pengetikan pada digit NPWP yang diinput, sehingga Saya diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024. (Bukti-3)
4.	26 Februari 2026	Pada hari yang sama saya telah melakukan perbaikan atas kesalahan pengetikan pada digit NPWP sebagaimana dimaksud dan mengunggah kembali dokumen yang telah diperbaiki sebelum batas waktu yang ditentukan.	
5.	4 Maret 2026	Sekretariat Pengadilan Pajak kembali menyampaikan melalui surat elektronik bahwa permohonan IKH yang saya ajukan telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap. (Bukti-4)	
6.	12 Maret 2026	Sekretariat Pengadilan Pajak kembali mengembalikan permohonan IKH yang saya ajukan dengan alasan bahwa status saya sebagai karyawan/pegawai pada CV. Rose Selular tidak tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup. (Bukti-5)	Padahal sebelumnya, pada tanggal 4 Maret 2026, permohonan IKH yang saya ajukan telah dilakukan penelitian oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan dinyatakan lengkap.
7.	13 Maret 2026	Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, saya telah melakukan perbaikan dengan mengunggah Daftar Riwayat Hidup yang telah diperbarui, yang mencantumkan status saya sebagai karyawan pada CV. Rose Selular.	
8.	13 Maret 2026	Sekretariat Pengadilan Pajak kembali menyampaikan melalui surat elektronik bahwa permohonan IKH saya masih dianggap belum lengkap, dan meminta saya untuk menyampaikan klarifikasi/penjelasan	

No.	Tanggal	Kejadian	Keterangan
		secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi IKH Online sebagai lampiran pada Daftar Riwayat Hidup. (Bukti-6)	
9.	13 Maret 2026	Menindaklanjuti permintaan tersebut, saya telah mengunggah keterangan tertulis disertai Daftar Riwayat Hidup yang telah diperbaiki melalui aplikasi IKH Online.	

Penegasan atas Kronologi

Berdasarkan kronologi tersebut di atas dapat disampaikan bahwa:

1. Permohonan Izin Kuasa Hukum yang saya ajukan pada 5 Februari 2026 telah dilakukan penelitian oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan dinyatakan lengkap pada tanggal 11 Februari 2026 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 serta Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024.
2. Permohonan tersebut kemudian dikembalikan untuk dilakukan perbaikan terkait kesalahan pengetikan pada digit NPWP, dan perbaikan telah saya lakukan pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan permintaan Sekretariat Pengadilan Pajak.
3. Setelah dilakukan perbaikan tersebut, permohonan IKH saya kembali dinyatakan lengkap pada tanggal 4 Maret 2026.
4. Namun demikian, pada tanggal 12 Maret 2026 permohonan tersebut kembali dikembalikan dengan alasan bahwa status saya sebagai karyawan pada CV. Rose Selular tidak tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup.
5. Atas hal tersebut, pada 13 Maret 2026 saya telah melakukan perbaikan dengan mengunggah Daftar Riwayat Hidup yang telah diperbarui serta keterangan tertulis melalui aplikasi IKH Online.
6. **Dengan demikian, secara administratif seluruh kekurangan dokumen yang diminta oleh Sekretariat Pengadilan Pajak telah saya penuhi.**

Fakta Lain yang Relevan Terkait Proses Administrasi Permohonan IKH

- Selain hal tersebut, terdapat kondisi lain yang menurut saya relevan untuk disampaikan dalam keberatan administrasi ini. Berdasarkan data yang dapat diakses melalui sistem **e-Tax Court Pengadilan Pajak**, tercantum nama **Agus Susetyo, S.E., M.M.** sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan yang terdaftar dengan Nomor KEP 46/PP/IKH/2024 dan berlaku sampai dengan 2 Mei 2026, sebagaimana terlihat pada tangkapan layar sistem e-Tax Court yang saya lampirkan sebagai bukti.

2. Memerintahkan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk **menindaklanjuti serta memproses penerbitan Izin Kuasa Hukum (IKH)** atas permohonan saya yang telah diajukan.

Demikian keberatan administrasi atas tindakan faktual ini saya sampaikan sebagai bentuk penyampaian fakta dan kronologi atas proses administrasi permohonan Izin Kuasa Hukum yang saya ajukan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Pajak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama KH

Lampiran S. Keb

